

## ABSTRAK

Kebijakan Kota Layak Anak diimplementasikan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2016. Namun, landasan hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut baru ditetapkan pada tahun 2020 melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Kota Lhokseumawe telah meraih 3 penghargaan Kota Layak Anak, yaitu kategori Pratama pada tahun 2020, kategori Madya pada tahun 2023, dan peringkat kategori Nindya berhasil diraih pada tahun 2025, akan tetapi, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, kurangnya ketersediaan arena bermain anak yang layak, masih adanya perokok aktif di sekitar anak-anak, serta keberadaan promosi rokok di beberapa titik di Kota Lhokseumawe. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam terkait hal tersebut dengan judul Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Lhokseumawe serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan penelitian terdiri dari Pemerintah Kota Lhokseumawe, dinas terkait, tokoh masyarakat dan anak di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya optimal dikarenakan belum memenuhi semua indikator Kota Layak Anak. Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Lhokseumawe telah dilaksanakan melalui berbagai program, di antaranya Forum Anak yang telah terbentuk di beberapa gampong di Kota Lhokseumawe, Sekolah Ramah Anak, pengembangan Gampong Layak Anak, serta penyediaan Layanan Puskesmas Ramah Anak. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain kurangnya anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, kurangnya sosialisasi menjadi penyebab masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan KLA, dan kurangnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) serta kepatuhan aktor .

***Kata Kunci*** : *Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Hak-hak Anak, Forum Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Kecamatan dan Desa Layak Anak.*

## **ABSTRACT**

*The Child-Friendly City Policy was implemented in the City of Lhokseumawe in 2016. However, the legal framework specifically regulating the implementation of this policy was only established in 2020 through Mayor Regulation Number 27 of 2020 concerning the Development of Child-Friendly Cities. The City of Lhokseumawe has received three Child-Friendly City awards, namely the Pratama category in 2020, the Madya category in 2023, and successfully achieved the Nindya category in 2025. Nevertheless, various problems are still found in the field, such as the increasing number of violence cases against children, the lack of proper children's playgrounds, the presence of active smokers around children, and cigarette advertisements in several areas of the city. Therefore, the researcher is interested in conducting a deeper study entitled "Implementation of the Child-Friendly City Policy in Lhokseumawe City. This study aims to analyze the implementation of the Child-Friendly City policy in Lhokseumawe City and to identify the inhibiting factors in its implementation. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving research informants consisting of the Lhokseumawe City Government, related agencies, community leaders, and children in Lhokseumawe City. The results of the study indicate that the implementation of the Child-Friendly City policy in Lhokseumawe City has been carried out through various programs, including the establishment of Child Forums in several villages in Lhokseumawe City, Child-Friendly Schools, the development of Child-Friendly Villages, and the provision of Child-Friendly Public Health Center services. However, the implementation of this policy still faces several obstacles, including limited budget allocation causing some activities to be unimplemented, lack of socialization resulting in low public awareness of the Child-Friendly City policy, and the insufficient availability of Child-Friendly Playgrounds (RBRA) as well as the lack of compliance among related actors.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Child-Friendly City, Children's Rights, Child Forum, Child-Friendly School, Child-Friendly Public Health Center, Child-Friendly Districts and Villages.*